



***Collaborative Governance* dalam Pengembangan Kampung Majapahit Sebagai Desa Wisata di Desa Bejijong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto**

Dynda Safitri Vandayani¹
Agus Widiyarta²

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

Corresponding Author: Dyndasafitri07@gmail.com

Article Info

Keyword:

Keyword 1;
Collaborative Governance
Keyword 2;
Tourist Village
Keyword 3;
Village Development

Abstract: *The development and development of potential rural tourist based villages or tourist villages today isa special attraction in Indonesia. One of them is development from majapahit village as a tourist village in the bejijong village of trowulan district mojokerto. By conveying the concept of a multiproduct village of one village, the tourist village offered a variety of tourist products. With such a concept, the tourist village majapahit bejijong was elected to 50 great bodes for the Indonesian tourist village (ADWI) 2021. The goal of this study is to describe and analyse governance governance in development of tourist villages in the village of majapahit village bejijong village trowulan district mojokerto. The study has been assessed using the factory-governance model of ansell and gash, which has four variables of preliminary conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaborative processes. The research method used is a qualitative approach using observation and interview methods in data collection. This study explains that the collaborative model of development of majapahit village asa tourist village in bejijong village involves several parties, among them the bejijong village government, mojokerto district government, the community, and the private sector of the lumbini Buddha parini bana. The study also explains that the collaborative process is well executed in spite of some shortcomings and obstacles, but they can be well addressed and do not interfere with the collaboration process.*

Kata Kunci:

Kata kunci 1;
Collaborative Governance
Kata kunci 2;
Desa Wisata
Kata kunci 3;
Pengembangan Desa

Abstrak: Pembangunan dan pengembangan potensi desa berbasis wisata pedesaan atau desa wisata saat ini menjadi daya tarik tersendiri di Indonesia. Salah satunya yaitu pengembangan Kampung Majapahit sebagai Desa Wisata di Desa Bejijong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. Dengan mengungus Konsep desa *one village multiproduct*, desa wisata ini menawarkan beragam produk wisata. Dengan konsep tersebut pula Desa Wisata Majapahit Bejijong terpilih menjadi 50 Besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata di Kampung Majapahit Desa Bejijong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini dianalisis menggunakan model *collaborative governance* dari Ansell and Gash yang memiliki empat variable yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan

kualitatif dengan menggunakan metode observasi dan wawancara dalam pengumpulan data. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa model kolaborasi pengembangan Kampung Majapahit sebagai Desa Wisata di Desa Bejjong melibatkan beberapa pihak, diantaranya Pemerintah Desa Bejjong, Pemerintah Kabupaten Mojokerto, masyarakat, dan pihak swasta yaitu dari Yayasan Lumbini Buddha Parini Bana. Dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa proses kolaborasi telah dilaksanakan dengan baik meskipun masih ada beberapa kekurangan dan kendala, namun hal tersebut dapat diatasi dengan baik dan tidak mengganggu proses kolaborasi.

Article History: Received 11-Februari-2022, Revised 22-Maret-2022, Accepted: 23-April-2022

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi yang terbagi atas beberapa wilayah, dalam melaksanakan sistem pemerintahannya menggunakan asas desentralisasi. Wilayah Indonesia terbagi menjadi beberapa wilayah administratif antara lain provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Desa berkewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangganya sendiri dalam berbagai aspek berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan NKRI. Dengan memahami bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka desa yang memiliki potensi asli yang strategis untuk dikembangkan memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Misra dalam (Trisianto, 2018) mengatakan bahwa desa adalah suatu kumpulan tempat tinggal dan kumpulan daerah pertanian dengan batas-batas tertentu yang luasnya antara 50 – 1.000 are. Berdasarkan pendapat tersebut membuktikan bahwa desa memiliki wilayah yang luas. Luasnya wilayah desa tentu memiliki potensi yang dapat dikembangkan oleh masyarakat desa. Potensi yang ada di setiap desa dapat dikembangkan sesuai dengan keinginan masyarakat dan pemerintah desa sendiri agar terwujudnya masyarakat desa yang makmur dan sejahtera sejalan dengan tujuan lahirnya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa. Pengembangan potensi desa yang saat ini sedang dikembangkan pemerintah salah satunya yaitu pembangunan desa wisata.

Pengembangan desa wisata merupakan sebuah bukti nyata dari pelaksanaan Undang-Undang nomor 32 tentang otonomi daerah. Desa wisata di Indonesia pada umumnya identik dengan wisata alam terbuka, tradisi, hingga interaksi lingkungan dengan potensi pariwisatanya yang beragam salah satunya seperti potensi budaya seperti adat-istiadat, museum, benteng, hingga situs peninggalan sejarah. Desa wisata adalah sebuah bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Pembangunan dan pengembangan potensi desa berbasis wisata pedesaan atau desa wisata saat ini menjadi daya tarik tersendiri di Indonesia salah satunya yaitu pengembangan Kampung Majapahit sebagai Desa Wisata di Desa Bejjong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. Desa Bejjong merupakan desa di Kawasan Kampung Majapahit yang memiliki keunggulan dan nilai penting karena lokasinya yang berada di jantung bekas Ibu Kota Kerajaan Majapahit. Desa ini memiliki daya tarik tersendiri didalamnya salah satunya terdapat patung Budha terbesar di Indonesia dan terbesar kedua di Asia yang dikelola oleh Yayasan Lumbini Buddha Parini Bana. Dengan mengusung Konsep desa *one*

village multiproduct, desa wisata ini menawarkan beragam produk wisata kebudayaan peninggalan dari Kerajaan Majapahit, kesenian, dan toleransi dalam hidup bermasyarakat. Dengan konsep tersebut pula Desa Wisata Kampung Majapahit yang berlokasi di Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur masuk menjadi 50 Besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021 yang diadakan oleh Kemendparekraf.

Menurut Inskeep yang dikutip dalam (Dewi et al., 2013) desa wisata sendiri merupakan bentuk pariwisata dimana didalamnya terdapat selompok kecil wisatawan tinggal di dalam atau di dekat kehidupan tradisional atau di desa-desa terpencil dan mempelajari kehidupan desa dan lingkungan setempat. Esensi desa wisata sendiri merupakan pengembangan suatu wilayah (desa) dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam masyarakat dan desa yang berfungsi sebagai atribut produk wisata, menjadi suatu rangkaian aktivitas pariwisata yang terpadu dan memiliki tema (Ariani, 2017).

Menurut pernyataan Hadiwijoyo yang dikutip dalam (Sudibya, 2018), desa wisata memiliki kriteria sebagai berikut.

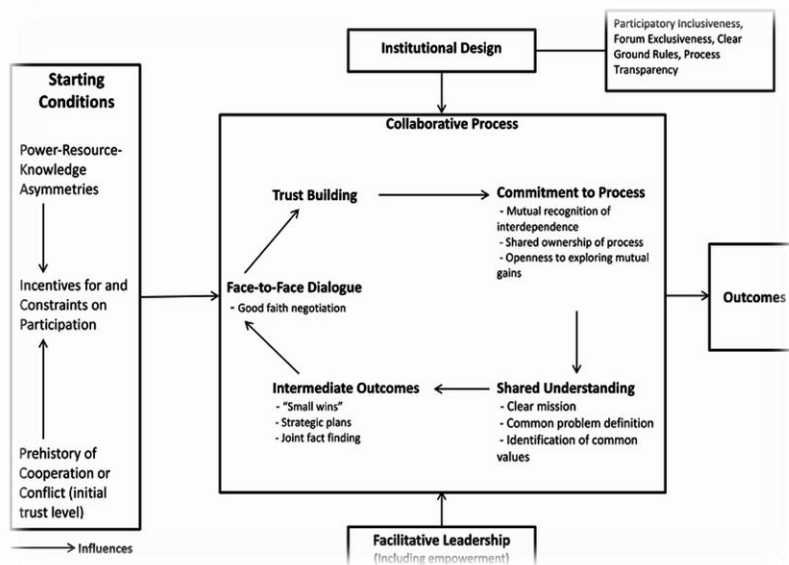
- 1) Aksesibilitasnya baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi;
- 2) Memiliki objek-objek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai objek wisata;
- 3) Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang ke desanya;
- 4) Keamanan di desa tersebut terjamin;
- 5) Tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai;
- 6) Beriklim sejuk atau dingin;
- 7) Berhubungan dengan objek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas.

Pengembangan dan pemanfaatan sebuah desa memiliki daya tarik wisata tersendiri dalam memanfaatkan potensi desa yang ada dengan harapan akan berpengaruh terhadap perbaikan perekonomian desa. Salah satu bentuk upaya yang bisa dilakukan dalam membangun perekonomian desa adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Kampung Majapahit ini sudah dikembangkan sejak lama akan tetapi dengan melihat potensi yang dapat berkembang tersebut wisata Kampung Majapahit lebih terfokuskan dikelola oleh Lembaga Desa Wisata atau disingkat Ladewi yaitu unit usaha di dalam BUM Desa “Wijaya” yang memiliki tugas mengembangkan potensi desa wisata yang ada seperti potensi kuliner, seni, sejarah dan religi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Desa dijelaskan dalam pasal 39 ayat 1 bahwa BUM Desa Bersama dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit usaha yang menjalankan usaha berbasis social , penyewaan, usaha perantara, perdagangan, dan/atau jasa keuangan. Dengan kehadiran BUM Desa dapat memperkuat ekonomi di desa. Menurut Adawiyah yang dikutip dalam (Pramestya & Wibawani, 2021) Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan sebuah instrument pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki desanya.

Desa wisata yang memiliki daya tarik berupa sejarah, budaya dan seni ini berkembang dengan didukung kerjasama antar pemangku kepentingan atau *Stakeholder*. Pengembangan disektor pariwisata Kampung Majapahit Desa Bejijong ini tidak bisa diperoleh hasil maksimal apabila hanya dilakukan dengan satu pihak saja yang terlibat, akan tetapi pembangunan juga harus didukung oleh beberapa pihak pendukung dengan tujuan mengoptimalkan pengembangan terbaik di sektor wisata. *Stakeholder* yang terlibat dalam kolaborasi tersebut tidak hanya dari sektor pemerintah, tetapi juga melibatkan sektor swasta dan sektor masyarakat dalam mendukung pengembangan pariwisata.

Berdasarkan konsep Kolaborasi dijelaskan oleh Ansell dan Gash yang dikutip dalam (Islamy, 2018) *Collaborative Governance* merupakan model pengendalian yang mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan *Stakeholder* non-state dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal. Pada pelaksanaan kolaborasi yang terjalin dalam pengembangan Desa Wisata Kampung Majapahit di Desa Bejijong dikatakan belum berjalan dengan baik karena masih terdapat beberapa permasalahan dan kekurangan didalamnya. Dijelaskan dalam model kolaborasi Ansell dan Gash dalam (Islamy, 2018) terdapat 4 variabel penting dalam keberhasilan sebuah kolaborasi yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi.

Gambar 1. Model Collaborative Governance Ansell and Gash



Sumber: Ansell and Gash, 2008

Bentuk kerjasama yang terjadi dalam pengembangan Desa Wisata Kampung Majapahit ini yaitu Lembaga Desa Wisata atau disingkat Ladewi yaitu unit usaha di dalam BUM Desa “Wijaya” dengan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mojokerto bekerjasama dalam pengembangan sektor pariwisata yang ada di Desa Bejijong ini seperti pengembangan candi. Selain itu ada juga keterlibatan masyarakat yang tergabung dalam paguyuban Sanggar Biungpandansari dalam pengembangan kampung majapahit yaitu dengan turut serta berkontribusi melestarikan tarian daerah dalam bentuk memberi pelatihan terhadap anak-anak di Desa Bejijong dan juga mengembangkan unit usaha seni kreatif pembuatan kaos dengan ciri khas kampung majapahit. Yayasan Lumbini Buddha Parini Bana merupakan yayasan pengelola wisata patung Budha di Desa Wisata Kampung majapahit Desa Bejijong. Dalam hal ini pihak pemerintah Desa Bejijong bekerjasama dengan Yayasan Lumbini Buddha Parini Bana dalam mempromosikan obyek wisata ini, selain mempromosikannya pihak pemerintah Desa Bejijong nantinya akan mendapat beberapa persen hasil dari penjualan tiket masuk di wisata patung Budha ini.

Collaborative governance ada untuk merespon permasalahan publik melalui kerjasama antar berbagai pemangku kepentingan, dan diharapkan keterlibatannya dapat membuat penanganan permasalahan menjadi lebih efektif dan efisien. Sehingga hubungan kerjasama antara pemerintah sebagai regulator dan pihak swasta sebagai pelaksana dapat dianggap sebagai suatu bentuk proses kolaboratif. Adanya keterlibatan pihak lain dalam hal ini merupakan praktik dari *Collaborative governance* sehingga penulis mengasumsikan adanya praktik *Collaborative governance* dalam pengembangan desa wisata Kampung Majapahit di Desa Bejijong.

Dari pernyataan tersebut maka tujuan dari penulisan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis *Collaborative governance* Dalam Pengembangan Desa Wisata di Kampung Majapahit Desa Bejijong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. Perlunya dilakukan penelitian ini lebih mendalam terkait *Collaborative governance* dalam pengembangan Kampung Majapahit sebagai Desa Wisata di Desa Bejijong dengan beberapa *Stakeholder* yang terlibat agar dapat mengembangkan desa wisata Kampung Majapahit menjadi lebih baik lagi kedepannya. Serta menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang akan diambil dalam visi membangun perekonomian masyarakat desa melalui pengembangan Desa Wisata.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan fenomena yang ada di lapangan serta menjelaskan secara mendalam terhadap kajian penelitian tentang pengembangan kampung majapahit sebagai desa wisata di Desa Bejijong dalam prespektif *collaborative governance* sehingga dapat menjawab kebenaran pada suatu fenomena dalam objek penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka.

Melalui penelitian ini, peneliti mempertimbangkan yang menjadi informan/narasumber adalah individu atau perorangan yang di anggap memiliki keterkaitan dengan hal yang akan diteliti. Key informan dalam penelitian ini adalah Ketua BUM Desa Bejijong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Desa Wisata Kampung Majapahit, Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto dengan alasan bahwa Desa ini merupakan bekas jantung dari Kerajaan Majapahit. Selain dari pada itu sebagai daerah yang memiliki karakteristik budaya yang kuat Desa Wisata Kampung Majapahit di Desa Bejijong mampu masuk kedalam nominasi 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2021.

TEMUAN DAN HASIL

Desa Bejijong merupakan sebuah bagian dari daerah Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto yang memiliki luas 195 ha. Kemudian, Desa ini juga berbatasan sebelah utara dengan Desa Kejagan, sebelah timur dengan Desa Trowulan, sebelah selatan dengan Desa Trowulan, dan sebelah barat dengan Kecamatan Mojoagung – Jombang. Desa Bejijong memiliki dua wilayah administratif / kedukuhan, yaitu Dusun Bejijong dan Dusun Kedungwulan yang terdiri dari 4 RW dan 14 RT. Mempunyai jumlah penduduk (data terakhir tahun 2020) sejumlah 3.883 jiwa. Mata pencaharian penduduk Desa bejijong sendiri secara umum adalah di bidang pertanian. Mata pencaharian lainnya yaitu pengrajin Cor Kuningan, pedagang, buruh pabrik, buruh tani, dan jasa lainnya.

Desa Bejijong adalah salah satu dari tiga desa yang ada di Kecamatan Trowulan yang termasuk dalam wilayah pengembangan II untuk dijadikan kawasan wisata purbakala. Desa yang berada di Kawasan Kampung Majapahit yang memiliki keunggulan dan nilai penting karena lokasinya yang berada di jantung bekas Ibu Kota Kerajaan Majapahit. Desa ini memiliki daya tarik tersendiri didalamnya salah satunya terdapat patung Budha terbesar di Indonesia dan terbesar kedua di Asia yang tersebar di area Maha Vihara Majapahit, miniatur Candi Borobudur, dan pohon Maja berbuah lebat yang merupakan asal usul Kerajaan Majapahit dan juga rumah para biksu yang pernah tinggal disana. Patung Budha Gautama yang memiliki panjang 22 meter, lebar 6 meter, serta tinggi 4,5 meter yang berada di Desa Bejijong tersebut kini menjadi salah satu ikon penting wisata Mojokerto. Desa Wisata Kampung Majapahit di Desa Bejijong saat ini memiliki fasilitas 200 homestay berbentuk bangunan Majapahit, dimana sejumlah 30 unit homestay telah siap dihuni di dalam Kawasan Kampung Majapahit Desa Bejijong.

Penelitian ini menjelaskan temuan-temuan di lapangan berdasarkan pengamatan penulis pada peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan fokus pada penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga langkah agar memperoleh hasil yang akurat. Melalui wawancara dengan beberapa narasumber, lalu melakukan observasi/pengamatan, dan melakukan pengumpulan dokumentasi berupa foto kegiatan maupun arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dijelaskan bahwa sudah adanya proses kolaborasi dengan pihak swasta maupun pihak pemerintah. Meskipun semua ini tidak serta merta berjalan dengan baik, masih ada kendala yang menyebabkan proses kolaborasi ini menjadi terhambat. Tetapi para *stakeholder* yang terkait dalam Pengembangan Kampung Majapahit Sebagai Desa Wisata di Desa Bejjong mengupayakan agar proses berkolaborasi berjalan sesuai dengan visi misi yang telah dibuat diawal.

Model *collaborative governance* dari Ansell and Gash yang dikutip dalam (Islamy, 2018) yaitu Kondisi awal, Desain kelembagaan, Kepemimpinan fasilitatif, Proses kolaborasi. Dari model tersebut nantinya diperkecil lagi menjadi sub-sub bagian. Dimana dalam proses kolaborasi merupakan inti dari model ini. Sedangkan kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif dipresentasikan sebagai sebuah pendukung yang juga memberi kontribusi penting dalam proses kolaborasi. Selain itu, model kolaborasi ini dipilih karena menjelaskan secara detail terkait proses kolaborasi. Dalam pengembangan Kampung Majapahit sebagai Desa Wisata di Desa Bejjong ini melibatkan kolaborasi antara pihak pemerintah dan non pemerintah untuk menunjang keberhasilan proses kolaborasi, dimana hal tersebut menjadi ciri dari adanya sebuah praktik *collaborative governance*.

Kondisi Awal

Kondisi awal merupakan bagian awal dari sebelum terjadinya proses kolaborasi. Dijelaskan menurut Ansell and Gash (2008) kondisi awal dipengaruhi oleh 3 variabel, yaitu ketidakseimbangan sumber daya dan pengetahuan antar pelaku kolaborasi, harus ada insentif dalam berkolaborasi, lalu adanya sebuah ketakutan saat kolaborasi dilaksanakan.

Desa Wisata Kampung Majapahit di Desa Bejjong memiliki destinasi wisata sejarah, religi dan budaya yang sangat melimpah, karena Desa Bejjong sendiri merupakan jantung dari Kerajaan Majapahit. Desa Wisata Kampung Majapahit, sendiri menawarkan berbagai macam budaya mulai dari pagelaran wayang kulit, karawitan, wisata sejarah candi Majapahit, rumah majapahit, dan pasar rakyat Kampung Majapahit. Namun ketidakseimbangan sumber daya dan pengetahuan terlihat dari sumber daya manusia yang kurang menyadari adanya sebuah potensi yang memiliki manfaat untuk dikembangkan di Desa Wisata Kampung Majapahit. Awal mula nya pengembangan Kampung Majapahit lebih dikenal karena peran masyarakat atau dalam hal ini sanggar pribadi milik masyarakat Desa Bejjong yaitu sanggar bagaskara. Dikarenakan sanggar tersebut miliki masyarakat pribadi di Desa Bejjong maka tujuannya sendiri kembali untuk pribadi.

Dari hal tersebut yang melatarbelakangi masyarakat terutama Pemerintah Desa tersadar untuk mengembangkan Kampung Majapahit sebagai Desa Wisata di Desa Bejjong. Sebelum tahun 2021 tepatnya sebelum masuk dalam 50 besar nominasi Anugerah Desa Wisata yang diadakan oleh KEMENPAREKRAF, Desa Wisata Kampung Majapahit belum memiliki sarana dan prasarana yang cukup salah satunya seperti fasilitas di homestay Rumah Majapahit. Selain itu, Rumah Majapahit yang ada Di Desa Bejjong masih 30 unit yang layak dan dapat di fungsikan sebagai homestay. Permasalahan ketidakseimbangan sumber daya adalah masalah bagi keberlangsungan kolaborasi. Ansell and Gash (2008) juga menjelaskan bahwa ketidakseimbangan sumber daya dapat menjadi masalah jika para *stakeholder* utama tidak memiliki infrastruktur organisasi yang representatif dalam kolaborasi. Tujuan dimana adanya

kolaborasi sendiri untuk mengisi kekosongan atau kekurangan yang dimiliki oleh *stakeholder* terkait. Sehingga dapat dikatakan setelah kolaborasi terjadi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta sumber daya yang tidak ada menjadi ada.

Proses pengembangan Kampung Majapahit sebagai Desa Wisata di Desa Bejjong, faktor partisipasi pihak yang terlibat juga sangat dibutuhkan. Partisipasi ini didasari atas sebuah motivasi, dimana motivasi tersebut menyebabkan para aktor ikut terlibat dalam proses kolaborasi. Motivasi tersebut yaitu ingin menguatkan bahwasanya Desa Bejjong ini memiliki potensi nilai jual yang dapat menghasilkan uang, juga dapat mengurangi pengangguran di Desa Bejjong. Seperti remaja-remaja karang taruna yang dapat dilatih untuk menjadi tour guide atau juga dapat berkreasi melalui sanggar binaan Lembaga Desa Wisata yaitu sanggar biungpandansari. Kemudian, terdapat juga sebuah paket wisata yang dikelola Lembaga Desa Wisata. Paket wisata ini melibatkan para aktor didalamnya seperti pada saat Ladewi mendapatkan rombongan tamu, dari sini pihak Ladewi akan berikan kepada masyarakat yang memiliki catering untuk mengurus konsumsinya. Sehingga secara tidak langsung ekonomi mereka juga terbantu. Kemudian dari pihak swasta yaitu pihak Yayasan Budha Tidur ketika ada waktu kunjungan ke patung budha tidur, pihak Ladewi meminta kompensasi khusus untuk harga tiket masuk rombongan, agar ketika rombongan masuk tidak sesuai dengan harga normal yang sudah tertera. Sehingga kolaborasi antara Pemerintah dengan Yayasan Budha Tidur dan masyarakat dapat terjalin dengan baik.

Sebelum terjadinya sebuah proses kolaborasi dalam pengembangan Kampung Majapahit di Desa Bejjong, terdapat konflik yang melibatkan sanggar pribadi milik masyarakat Desa Bejjong dengan sanggar binaan dari Lembaga Desa Wisata di Desa Bejjong. Dikarenakan kurangnya kesadaran Pemerintah Desa Bejjong akan potensi yang ada di Desa Bejjong menyebabkan terjadinya selisih paham terkait wewenang untuk mengembangkan Kampung Majapahit sebagai Desa Wisata di Desa Bejjong ini. Selain itu, konflik juga terjadi berupa penolakan dari pihak yayasan patung budha tidur. Penolakan tersebut karena alasan mereka adalah sebuah yayasan, jadi itu menjadi hak milik sendiri. Dari keadaan tersebutlah mulai terjadi sebuah konflik juga yang melibatkan pihak yayasan dengan Pemerintah Desa Bejjong.

Menurut Ansell and Gash (2008) yang dikutip dalam (Islamy, 2018) dijelaskan bahwa dari sebuah konflik sendiri dapat menimbulkan sebuah inisiatif untuk berpartisipasi dalam *collaborative governance* ketika timbul perasaan tidak dapat mencapai tujuan tanpa terlibat dalam proses kolaborasi. Dari adanya konflik sebelum proses kolaborasi tersebut Pemerintah Desa mulai bergerak untuk memperbaiki keadaan. Pihak Pemerintah Desa mulai aktif mengadakan sosialisasi hingga pertemuan dengan pihak masyarakat, yayasan maupun dengan pihak Pemerintah Daerah. Usaha yang di buat oleh Pemerintah Desa tersebut dibuktikan dengan Kampung Majapahit Desa Bejjong masuk kedalam 50 Besar Nominasi Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2021.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi awal mulai dari sebelum terjadinya kolaborasi hingga memasuki proses kolaborasi dalam pengembangan Kampung Majapahit sebagai Desa Wisata di Desa Bejjong dapat dikatakan sudah baik. Hal tersebut dibuktikan dari adanya motivasi bersama para aktor yang terlibat sehingga dapat menyebabkan terbentuknya sebuah kepercayaan dan komitmen yang kuat dalam berkolaborasi.

Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan menurut Ansell and Gash (2008) mengacu pada aturan dasar dan tata cara serta penyelenggaraan yang transparan dalam proses kolaborasi. Terdapat aturan dasar yang mengikat para aktor dalam proses kolaborasi pengembangan Kampung Majapahit sebagai Desa Wisata di Desa Bejjong yang tertuang di dalam MOU. Seperti kerjasama dengan lembaga

swasta, yayasan, atau dengan lembaga-lembaga pribadi yang terkait, semua sudah diatur dalam MOU kesepakatan. Namun berbeda dengan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga yang tidak memiliki aturan dasar, karena peran Dinas pariwisata sendiri hanya sebagai Pembina yang memiliki kewajiban membina Kampung Majapahit sebagai Desa Wisata. Seperti halnya memberikan pembinaan kepada masyarakat terkait dengan adanya pelatihan, serta memberikan peluang kepada masyarakat Desa Bejijong ketika ada event-event agar dapat mempromosikan desa wisata ini. Namun sayangnya pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata belum dilakukan secara terjadwal. Seperti contoh ketika akan ada kunjungan dari Bapak Sandiaga Uno, Dinas Pariwisata baru melaksanakan pelatihan kurang lebih 4 kali pertemuan.

Lalu ada juga sosialisasi yang dilakukan sebulan sekali untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, sehingga tercipta dan terbentuknya kesadaran bersama untuk mengembangkan Kampung Majapahit sebagai Desa Wisata. Karena itu sebuah bentuk penyadaran kepada masyarakat bahwa di desa memiliki nilai jual. Banyak yang bisa digunakan sebagai nilai jual, Mulai dari tingkah laku, dan budaya sopan santunnya. Didalam Ladewi terdapat unit kerja yang disebut KODARWIS (Kelompok Sadar Wisata), yang dimana ini merupakan hasil bentukan dari Disparpora yang memiliki SK. Karena ada keberadaan Ladewi di desa, jadi Ladewi berkolaborasi dengan KODARWIS untuk membuat sebuah forum baik tingkat RT, RW hingga tingkat desa guna membahas apa-apa yang terkait dengan pengembangan Kampung Majapahit sebagai Desa Wisata. Dengan mendatangkan narasumber dari DPMD untuk membahas Tata Tertib atau Perdes terkait Desa Wisata.

Dapat disimpulkan bahwa Desain Kelembagaan dalam pengembangan Kampung Majapahit sebagai Desa Wisata di Desa Bejijong belum optimal. Ditujukan dengan masih belum ada aturan dasar kolaborasi selain MOU, sehingga perlu di buat aturan dasar dalam berkolaborasi agar ada acuan aturan yang resmi. Serta dari Dinas Pariwisata yang belum menjalankan perannya secara teratur dan berkelanjutan dan juga kesadaran masyarakat yang masih perlu di perbaiki dalam pengembangan Kampung Majapahit sebagai Desa Wisata ini.

Kepemimpinan Fasilitatif

Dalam mengambil sebuah keputusan, peran dari pemimpin sangatlah penting, termasuk dalam *collaborative governance*. Dijelaskan oleh Ansell and Gash (2008) yang dikutip dalam (Islamy, 2018) mengatakan bahwa kepemimpinan fasilitatif menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses kolaborasi, dengan proses kolaborasi sebagai unsur utama yang dipengaruhi oleh kepemimpinan dan kelembagaan dalam mencapai sebuah hasil. Berdasarkan teori dan hasil di lapangan, dijelaskan bahwa Kepimpinan fasilitatif dalam Pengembangan Kampung Majapahit sebagai Desa Wisata di Desa Bejijong ini lebih dominan dilakukan oleh Ladewi (Lembaga Desa Wisata). Dibuktikan dengan seluruh kegiatan dari proses awal hingga manajemen dilakukan oleh Lembaga Desa Wisata atau Ladewi. Peran Pemerintah Desa disini hanya sebagai penanggung jawab atas Lembaga Desa Wisata. Sedangkan peran dari Ladewi sendiri dalam Pengembangan Kampung Majapahit yaitu membuat inovasi-inovasi dan membuat konsep yang memanfaatkan potensi yang ada di Desa sehingga kemudian nantinya bisa dijual.

Selain itu, dalam proses kolaborasi ini pihak Yayasan budha tidur juga memiliki peran dalam mengelolah patung budha tidur terbesar yang ada di Desa Bejijong ini. Kemudian, yang perlu disorot juga adalah peran masyarakat, dalam hal ini melalui Sanggar Biyung Pandansari juga turut ikut serta dalam Pengembangan Kampung Majapahit sebagai Desa Wisata di Desa Bejijong. Peran kepemimpinan fasilitatif yang dilakukan oleh ketua Sanggar Biyung Pandansari ini sangat aktif, dari mulai ikut melatih, Berkoordinasi dengan BUMDesa, serta berkoordinasi juga dengan Ladewi. Itu semua peran yang dilakukan oleh ketua Sanggar Biyung Pandasari

Dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan fasilitatif dalam Pengembangan kampung Majapahit sebagai Desa Wisata di Desa Bjjong masih lebih dominan dilakukan oleh Lembaga Desa Wisata atau Ladewi, walaupun ada juga peran yang dilakukan oleh Yayasan Budha Tidur dan Sanggar Biyung Pandansari.

Proses Kolaborasi

Dalam proses kolaborasi, seluruh tata kelola kolaborasi dimulai dari dialog tatap muka. Menurut Ansell and Gash (2008) komunikasi merupakan bagian yang penting dari sebuah proses kolaborasi. Dialog tatap muka menjadi sebuah alat untuk membangun sebuah komitmen dan kepercayaan dalam proses kolaborasi, pemahaman bersama antar para aktor selalu mengutamakan dialog dalam setiap proses hingga terbentuknya sebuah kesepakatan bersama. Dalam pengembangan Kampung Majapahit sebagai Desa Wisata di Desa Bejjong, para aktor kolaborasi sering mengadakan musyawarah dalam bentuk forum guna membahas hasil maupun evaluasi. Pertemuan yang dilakukan oleh para aktor kolaborasi salah satunya membahas tentang Tatib atau Peraturan Desa (Perdes) terkait desa wisata. Rapat internal yang diadakan berupa koordinasi atau sosialisasi oleh pengurus Ladewi ini bersifat rutin kurang lebih diadakan 4-5 kali dalam seminggu. Rapat rutin ini sangat penting untuk dihadiri oleh para aktor kolaborasi yang berkaitan dengan pengembangan Kampung Majapahit sebagai Desa Wisata, dikarenakan perlu adanya ide-ide inovasi yang dapat lebih mengembangkan Kampung Majapahit. Dalam forum atau pertemuan pasti melibatkan semua pihak, namun terkadang beberapa pihak terkendala dengan waktu, meskipun terkendala waktu forum tetap diadakan dengan aktu yang berbeda agar tetap menjalin keterbukaan dan mengurangi permasalahan dalam berkolaborasi.

Dapat penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam fokus dialog tatap muka dalam bentuk sosialisasi, rapat internal, serta rapat koordinasi dalam pengembangan Kampung Majapahit sebagai Desa Wisata di Desa Bejjong telah dilaksanakan meskipun tidak secara berkala dan terjadwal tetapi para aktor tetap melakukan komunikasi untuk mendapatkan informasi terkait hal-hal penting yang perlu di komunikasikan.

Dalam setiap kegiatan, membangun kepercayaan merupakan hal yang penting. Membangun sebuah kepercayaan dan komitmen merupakan bentuk proses yang memerlukan waktu lama untuk mencapai hasil kolaborasi yang maksimal. Seperti pendapat Goetsch dan Davis yang dikutip dalam (Patras & R, 2018) yang menyatakan bahwa dalam berkomunikasi, penyampaian dan penerimaan pesan butuh saling percaya. Berdasarkan sebuah temuan yang ada di lapangan kolaborasi yang dilakukan oleh para *stakeholder* dalam pengembangan Kampung Majapahit sebagai Desa Wisata memiliki sebuah cara atau upaya sendiri dalam membangun kepercayaan antar sesama dengan melakukan komunikasi dan keterbukaan. Komunikasi dan keterbukaan sendiri dilakukan tidak hanya dengan para aktor kolaborasi, akan tetapi komunikasi dan keterbukaan dengan pihak internal baik secara formal maupun informal. Baik komunikasi secara formal atau informal penyampaian yang dilakukan oleh para *stakeholder* tetap berjalan efektif.

Selain itu Dalam proses kolaborasi dalam pengembangan Kampung Majapahit sebagai Desa Wisata di Desa Bejjong, Lembaga Desa Wisata juga membangun kepercayaan kepada para *stakeholder* dengan selalu melakukan transparansi. Hal ini tertuang dalam MOU yang menjelaskan tentang kerjasama antar para *stakeholder*. Ini bertujuan agar tidak ada yang ditutupi dalam berkolaborasi. Seperti contoh transparansi yang dilakukan oleh pihak Desa Bejjong, mereka menyampaikan kendala-kendala yang berkaitan dengan kolaborasi.

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa dalam membangun kepercayaan di dalam pengembangan Kampung Majapahit sebagai Desa Wisata di Desa Bejjong telah dilaksanakan dalam bentuk upaya melalui komunikasi, koordinasi dan transparansi. Upaya tersebut dilakukan untuk memperkecil terjadinya permasalahan terkait komunikasi dengan para *stakeholder*,

meningkatkan tingkat kepercayaan dari masyarakat, dan untuk menyampaikan evaluasi serta kendala-kendala yang ada.

Menurut Ansell and Gash (2008) suatu kegiatan tidak akan berhasil apabila para pelakunya tidak mempunyai komitmen yang kuat dalam proses pelaksanaannya. Jadi apabila komitmen dari pemangku kepentingan kurang, maka akan menjadi suatu permasalahan. Kemudian hasil dari peneliti di lapangan diketahui bahwa adanya komitmen dari para *stakeholder* diawali dengan melihat potensi yang dimiliki oleh Desa Bejjong. Kemudian dikembangkan dan nantinya akan menjadi daya tarik untuk dikunjungi para wisatawan. Para pihak yang terlibat dalam pengembangan desa wisata ini memiliki komitmen yang sama yaitu mengembangkan Desa Bejjong yang memiliki banyak potensi. Selain itu dasar para *stakeholder* berkomitmen bekerjasama juga karena melihat potensi yang ada dapat menghasilkan keuntungan. Namun dalam proses kolaborasi juga tidak mudah karena setiap *stakeholder* yang memahami tujuan dari kerjasama ini pasti memiliki dasar untuk kebutuhan masing-masing. Sehingga berkomunikasi sangat diperlukan, apalagi untuk mengembangkan Kampung Majapahit sebagai Desa Wisata di Desa Bejjong. Seperti misalnya membuat paket wisata ini dimana didalamnya melibatkan para *stakeholder* untuk terlibat.

Dapat disimpulkan bahwa komitmen para aktor terhadap proses kolaborasi didasari kebutuhan untuk mencapai tujuan masing-masing. Akan tetapi mereka tidak melupakan tujuan untuk mengembangkan Kampung Majapahit sebagai Desa Wisata di Desa Bejjong. Setiap Organisasi atau kelompok masyarakat dalam mencapai suatu tujuan tertentu selalu dilandasi adanya visi dan misi yang jelas. Pemangku kepentingan harus memiliki pemahaman yang sama dari diadakannya kolaborasi, seperti visi dan misi, tujuan yang jelas, dan penyelarasan inti masalah (Islamy, 2018). Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa para aktor yang terlibat dalam kolaborasi memiliki kesepahaman yang sama, hal ini ditunjukkan dengan adanya pemahaman para aktor yang terkait dengan peran mereka untuk mencapai tujuan dalam pengembangan Kampung Majapahit sebagai Desa Wisata di Desa Bejjong. Seperti melakukan pendekatan, rapat koordinasi, serta bersosialisasi mengenai kebutuhan yang diperlukan untuk mengembangkan Desa Wisata di Desa Bejjong. Dan juga kesepahaman antara aktor kolaborasi dibentuk dengan adanya pertemuan dan musyawarah.

Selain itu, terdapat juga visi misi yang dilakukan oleh para aktor dalam pengembangan Kampung Majapahit sebagai Desa Wisata di Desa Bejjong. Namun fakta di lapangan dengan adanya perbedaan pandangan di masyarakat yang menyebabkan terkendalanya dalam menyampaikan visi misi. Masih banyak masyarakat yang masih belum paham akan maksud dan tujuan diadakannya kolaborasi ini dalam pengembangan Kampung Majapahit sebagai Desa Wisata di Desa Bejjong.

Dari hasil yang didapatkan, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesepahaman bersama antar aktor kolaborasi pengembangan Kampung Majapahit sebagai Desa Wisata di Desa Bejjong. Hal ini ditunjukkan dengan pahamiannya peran para aktor dalam upaya menciptakan kesepahaman bersama dalam pengembangan Kampung Majapahit sebagai Desa Wisata di Desa Bejjong. Namun terdapat pandangan masyarakat yang menyebabkan penyampaian visi misi belum maksimal.

Dengan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa sudah ada proses kolaborasi, baik dengan pihak swasta maupun pemerintah. tetapi tidak serta merta dapat berjalan dengan baik, masih adanya kendala yang menyebabkan proses kolaborasi ini menjadi sedikit terhambat. Namun demikian para *stakeholder* yang terkait dalam Pengembangan Kampung Majapahit Sebagai Desa Wisata di Desa Bejjong mengupayakan agar proses berkolaborasi berjalan sesuai dengan visi misi yang telah dibuat diawal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa model kolaborasi pengembangan Kampung Majapahit sebagai Desa Wisata di Desa Bejjong didalamnya melibatkan beberapa pihak, diantaranya yaitu Pemerintah Desa Bejjong dalam hal ini melalui BUM Desa; lalu dengan pihak Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang diwakili oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mojokerto; pihak masyarakat yang tergabung di dalam paguyuban Sanggar Biungpandansari; pihak swasta yaitu dari Yayasan Lumbini Buddha Parini Bana. Meskipun demikian, desain kelembagaan dalam pengembangan Kampung Majapahit sebagai Desa Wisata masih belum terdapat aturan dasar kolaborasi selain MOU kesepakatan, selain itu juga, dari Dinas Pariwisata yang belum menjalankan perannya secara teratur dan berkelanjutan, serta masih kurangnya kesadaran masyarakat yang masih perlu di perbaiki dalam pengembangan Kampung Majapahit sebagai Desa Wisata ini.

Proses kolaborasi dilakukan dengan beberap tahapan dengan diawali dengan dialog tatap muka dengan seluruh stakeholder yang ada. Selain itu juga dilakukan pemahaman dalam membangun kepercayaan antar stakeholder dengan penguatan komitmen yang ada agar Desa wisata bisa berjalan dengan baik. Hasil sementara yang didapat dari proses kolaborasi sudah berjalan dengan semestinya Baik dengan pihak swasta mapun dengan pihak pemerintah. Meskipun semua ini tidak serta merta berjalan dengan baik, tetapi tetap mengupayakan agar proses berkolaborasi berjalan sesuai dengan visi misi yang telah dibuat diawal.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penelitian ini memberikan beberapa saran dan masukan yang membangun untuk kedepannya, antara lain: 1) Masyarakat Desa Bejjong harus lebih peduli dan memahami akan potensi yang ada di Desa Bejjong. Dikarenakan dari kesadaran masyarakat sendirilah yang dapat membuat Desa Wisata Kampung Majapahit menjadi lebih berkembang; 2)Pemerintah Desa juga harus sadar akan pentingnya mengembangkan potensi yang sudah ada di Desa Bejjong. Juga turut mendukung dan membantu masyarakat dalam mengembangkan Kampung Majapahit sebagai Desa Wisata dengan memberikan fasilitas yang diperlukan; 3)Peran dari para *stakeholder* dalam pengembangan Kampung Majapahit sebagai Desa Wisata harus lebih ditingkatkan agar menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Terutama peran dari pihak Yayasan Lumbini Buddha Parini Bana dalam mendukung Pemerintah Desa untuk mengembangkan Kampung Majapahit sebagai Desa Wisata di Desa Bejjong ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, D., Mustari, N., Hardi, R., & Mone, A. (2019). *Collaborative governance* dalam Mengembangkan Wisata Edukasi di Desa Kamiri Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 04(02),112-127. <http://dx.doi.org/10.1155/2015/420723%0Ahttp://link.springer.com/10.1007/978-3-319-76>
- Alfiah, S., Andriani, J., Lesmana, R., Sunardi, N., & Furyanah, A. (2019). Manajemen Pengelolaan Desa Wisata Pada Desa Cimanggu, Kecamatan Cislak, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat (Studi Kasus Pada Curug Paok dan Bukit Pasir Jaka). *Abdi Masyarakat Humanis*, 1(1), 21-28.
- Andayani, A. A. I., Martono, E., & Muhamad, M. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(1), 1.

<https://doi.org/10.22146/jkn.18006>

- Anggara, S. (2015). *Metode Penelitian Administrasi*. Pustaka Setia.
- Anshar, M. Y. (2018). *Model Manajemen Badan Usaha Milik Desa Melalui Pendekatan Collaborative governance Sebagai Modal Sosial Ekonomi Pembangunan Desa di Desa Pujon kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang (Bab II Collaborative governance)*. 29–55.
- Antaraneews.com. (2021). Pemkab Mojokerto dorong pengembangan potensi wisata Trowulan. Antaraneews.com. Diakses 2 Oktober 2021. Website : <https://www.antaraneews.com/berita/974014/pemkab-mojokerto-dorong-pengembangan-potensi-wisata-trowulan>
- Ariani, A. (2017). Model Akselerasi Pengembangan Sambi Sebagai Desa Wisata Di Yogyakarta Melalui Rintisan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Bidang Pariwisata. *Jurnal Media Wisata*, 15(1). <https://doi.org/10.36276/mws.v15i1.90>
- Astuti, R. S. A., Warsono, H., & Rochim, A. (2020). *Collaborative governance dalam Perspektif Administrasi Publik* (T. D. Press & Perancang (eds.)). Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press.
- Barniat, Z. (2019). Otonomi desa : Konsepsi teoritis dan legal; *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 5(1), 20–33.
- Borneoneews.co.id. (2021). Menparekraf Gali Potensi di Bumi Majapahit. Borneoneews.co.id. Diakses 15 Oktober 2021. Website : <https://www.borneoneews.co.id/berita/230803-menparekraf-gali-potensi-di-bumi-majapahit>
- Dewi, M. H. U., Fandeli, C., & Baiquni, M. (2013). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara*, 3(2), 129–139. <https://doi.org/10.22146/kawistara.3976>
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Ustiawaty, R. A. F. J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Ria Rahmatul Istiqomah. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. In *Pustaka Ilmu* (Issue March).
- Indonesiabaik.id. (2021). Indonesia Punya Ribuan Desa Wisata. Indonesiabaik.id. Diakses 1 Oktober 2021. Website : <https://www.indonesiabaik.id/index.php/videografis/indonesia-punya-ribuan-desa-wisata>
- Islamy, L. O. S. (2018). *Collaborative governance konsep dan aplikasi*. CV Budi Utama.
- Jadesta.com. (2021). Desa Wisata Kampung Majapahit Desa Bejijong. Jadesta.com. Diakses 10 Oktober 2021 Website : <https://jadesta.com/desa/30251>
- Kememparekraf.go.id. (2021). Andalkan Wisata Budaya, Kampung Majapahit Bejijong Jatim Masuk 50 Besar ADWI 2021. Kememparekraf.go.id. Diakses 10 Oktober 2021. Website : <https://kememparekraf.go.id/berita/Siaran-Pers-:-Andalkan-Wisata-Budaya,-Kampung-Majapahit-Bejijong-Jatim-Masuk-50-Besar-ADWI-2021>
- Kompas.com. (2021) 50 Desa Wisata Terbaik di Indonesia. Kompas.com. Diakses 17 Oktober 2021. Website : <https://travel.kompas.com/read/2021/08/23/210251227/50-desa-wisata-terbaik-di-indonesia?page=all>
- Liputan6.com. (2021). Termasuk Jatim, Ini Jurusan Kememparekraf Kembangkan 244 Desa Wisata di Indonesia. Liputan6.com. Diakses pada 2 Oktober 2021. Website : <https://surabaya.liputan6.com/read/4381769/termasuk-jatim-ini-jurusan-kememparekraf-kembangkan-244-desa-wisata-di-indonesia>
- Merdeka.com. (2021). Data BPS: Indonesia Miliki 1.734 Desa Wisata. Merdeka.com. Diakses pada 2 Oktober 2021. Website : <https://www.merdeka.com/uang/data-bps-indonesia-miliki-1734-desa-wisata.html>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: a methods sourcebook (Third)*. SAGE Publications.

- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Muafi, K. (2020). *MODEL PENGEMBANGAN DESA WISATA “KAMPUNG MAJAPAHIT” (Studi Kasus Desa Bejjong , Kecamatan Trowulan , Kabupaten Mojokerto) SKRIPSI Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara Oleh KHOIRUL MUAFI UNIVERSITAS ISLAM MAL. UNIVERSITAS ISLAM MALANG.*
- Musthofa, B. M. (2020). Urgensi Penguatan Partisipasi Dan Inisiatif Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Wisata Perdesaan. *Sosioglobal : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.24198/jsg.v4i1.22454>
- Novianto, W., Sutrisno, E., Hermawan, R., Nurjaman, R., & Suprihartini, A. (2015). *Telaahan Isu-Isu Strategis*.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. (Vol. 1, Issue 1).
- Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2019
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015
- Pramesty, eka arum, & Wibawani, S. (2021). *TATA KELOLA BERKOLABORASI DALAM PENGELOLAAN BUM DESA: STUDI KASUS BUM DESA “SEWU BAROKAH” DI DESA PENATARSEWU*. 19(1), 262–274.
- Radarmojokerto.id. (2021). Kampung Majapahit Masuk Top 50 dari 1.831 Desa Wisata di Indonesia. Radarmojokerto.id. Diakses 2 Oktober 2021. Website : <https://radarmojokerto.jawapos.com/beritadaerah/mojokerto/17/09/2021/kampung-majapahit-masuk-top-50-dari-1831-desa-wisata-di-indonesia>
- Sudibya, B. (2018). Wisata Desa dan Desa Wisata. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 1(1), 22–26. <https://doi.org/10.51172/jbmb.v1i1.8>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Timesindonesia.co.id. (2021) Menparekraf RI Resmikan Desa Wisata Majapahit Mojokerto. Timesindonesia.co.id. Diakses 12 Oktober 2021. Website : <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/370683/menparekraf-ri-resmikan-desa-wisata-majapahit-mojokerto>
- Trisianto, C. (2018). Penggunaan Metode Waterfall Untuk Pengembangan Sistem Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan Pedesaan. *Jurnal Teknologi Informasi ESIT*, xii(01).
- Tilano, F. A., & Suwitri, S. (2019). Collaborative Governance dalam upaya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Semarang. *Journal of Public Policy And Management Review*, 8(3), 1-18. <https://ejurnal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/24039>
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004